



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)



TAHUN 2022

DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	Dinas Perkebunan	PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 131.429.000,-	Rp. 119.769.259,- (93.55%)	-	-	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.707.569.964,-	Rp 4.267.190.005,- (96.19%)	-	-	
			PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp. 12.520.000,-	Rp. 11.320.000,- (90.42%)	-	-	

		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 236.262.900,-	Rp. 233.227.494,- (99.42%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 73.244.487,-	Rp. 71.023.500,- (97.34%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 90.603.625,-	Rp. 84.837.577,- (93.83%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp. 244.624.000,-	Rp. 99.088.900,- (40.51%)	Kelompok Tani penerima pupuk belum terdaftar di simluhtan dan nilai standar satuan harga (SSH) tidak disesuaikan setelah kenaikan BBM sehingga tidak terjangkau harga pupuk dipasaran	Melakukan entry pada simluhtan terhadap kelompok penerima manfaat dan menyusun SSH yang tepat pada tahun berikutnya	

		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 61.450.000,-	Rp. 58.152.764,- (94.63%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 30.212.000,-	Rp. 27.032.850,- (89.48%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp. 4.121.592.351,-	Rp. 3.934.690.650,- (95.47%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian/ Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp. 12.271.000,-	Rp. 12.236.650,- (99.72%)	-	-	-

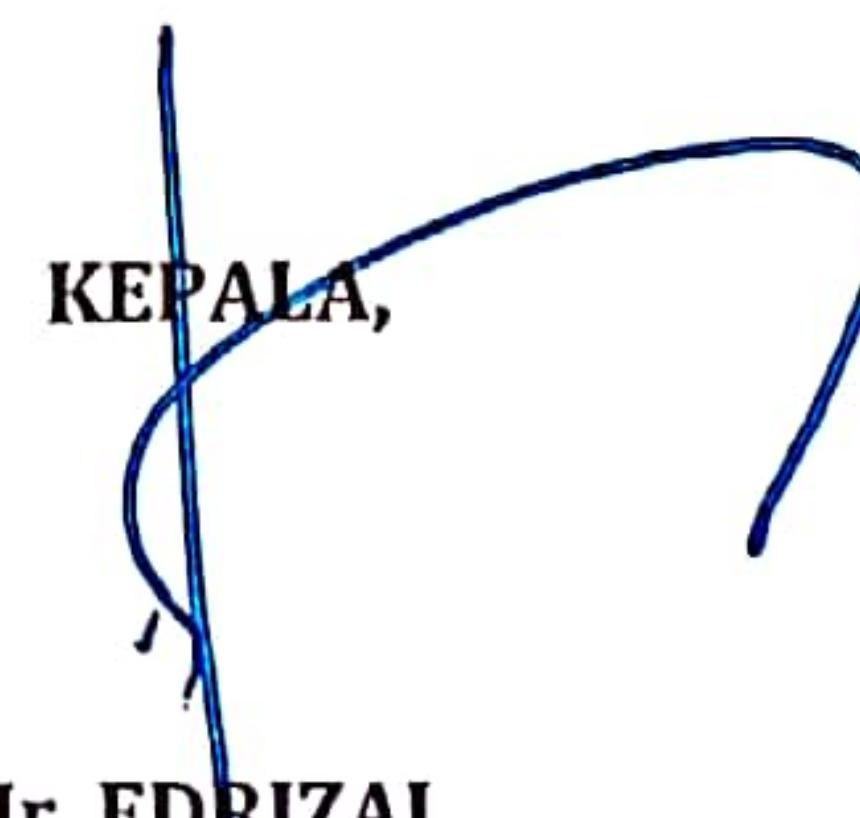
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Perizinan Usaha Pertanian/ Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 15.790.000,-	Rp. 15.736.500,- (99.66%)	-	-	-
		PERMENDAGRI Nomor 90 Tahun 2019	Program Penyuluhan Pertanian/ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp. 255.273.200,-	Rp. 247.511.800,- (96.92%)	-	-	-

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	-	-	-

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2021	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Terkait kebun Pemda Pasaman Barat yang ada di Padang tujuh, Kami Rekomendasikan agar Dinas Perkebunan untuk segera berkoordinasi dengan instansi yang terkait tentang pelepasan atau pemusnahan aset sesuai dengan lahan peruntukan penda provinsi dan lahan peruntukan ninik mamak aur kuning.	Telah dilakukan sensus kebun	Melakukan inventarisasi asset yang akan diserahkan
2,	Kami Rekomendasikan kepada dinas perkebunan bersikap tegas terhadap PKS -PKS yang tidak mematuhi aturan perkebunan sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.	Dibentuk Satgas ke PKS tentang serapan TBS masyarakat	Harga TBS dan serapan TBS



KEPALA,

Ir. EDRIZAL
Pembina Utama Muda / IV. c
NIP. 19640218 199302 1 001